



Rencana Kerja 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Tanah Bumbu

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA. 2019 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Batulicin, 2018
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu**

Roy Rizali Anwar, MT
NIP. 19810430 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum..... 4

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum 5

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 5

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 7

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..... 8

3.3 Program dan Kegiatan 8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 9

BAB IV PENUTUP..... 10

LAMPIRAN..... 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019. Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021 yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD. (MENDUKUNG VISI MISI BUPATI)

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapainya pada tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

9. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu;
15. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2019).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 adalah Untuk **menjabarkan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum** dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (**tahun 2017**) dan perkiraan capaian tahun **berjalan (tahun 2018)**. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra 2016-2021

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Tabel Evaluasi Renja disajikan dalam Tabel T-C.29, disertai Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun 2017 Triwulan IV pada tabel 2.1 dengan format tabel terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Disajikan dengan dengan format Tabel T-C.30 (terlampir).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah sebagai berikut::

- SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pencapaian terhadap aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017;
- Kondisi jalan tidak mantap masih tinggi , yaitu 63,85 %
- Pencapaian terhadap Program Universal akses untuk terpenuhinya kebutuhan air minum 100 %, penanganan kawasan kumuh hingga 0 % dan pemenuhan sanitasi yang layak sebesar 100 %.
- Pentingnya mendorong Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi, serta terhadap daya rusak air, yang akan dihidupkan melalui sasaran strategis :
 - Meningkatkan dukungan ketahanan air
 - Meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi
 - Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air
- Tingginya alih fungsi lahan, terutama kawasan hutan dan pada daerah resapan air;
- Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan,

Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu adalah:

- Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur
- Sesuai dengan Renstra Kementrian PUPR tahun 2015-2019, arah kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22 “Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”.

Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diintegrasikan dengan sasaran pokok dan program nasional.

Beberapa program WPS yang diintegrasikan dengan sasaran pokok dan program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD bisa terlihat pada tabel T-C.31 (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kab

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu.

3.1.1 Telaahan terhadap RPJMN

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana, Kementerian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa Program Lintas/ Program/Kegiatan Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

3.1.2 Terhadap Renstra Kementerian PUPR

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra tahun 2016-2021.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu, yang dirumuskan dalam Renstra tahun 2016-2021, disajikan dalam tabel 3.2 (terlampir)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 (terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 JABARAN CAS CADING

4.2 KERANGKA PENDANAAN (TABEL 3.1 , APBD I, APBN, CSR)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 380.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 111.930.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 311.545.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 449.657.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 96.094.310,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 57.330.000,00
Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 96.094.310,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 26.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 62.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 58.000.000,00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 1.186.900.000,00
Penyedia jasa tenaga non PNS	Rp. 1.161.645.000,00
Rapat rapat koordinasi dalam daerah	Rp. 200.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Rp. 2.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Rp. 30.000.000,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	
Pembangunan gedung kantor	Rp. 32.000.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 24.200.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat	Rp. 18.000.000.000,00
Program Peningkatan Layanan Air Bersih	
Pengembangan SPAM	Rp. 21.677.886,552,00
Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Rp. 1.066.441.500,00
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Rp. 5.200.000.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
Pembangunan Jalan	
Pembangunan Jembatan	Rp. 2.350.000.000,00
Pembangunan PJU Jalan Sepunggur - Gunung Tinggi (Multi Years)	Rp. 10.000.000.000,00
Survey Kondisi Jalan	Rp. 326.910.000,00
Perencanaan Kegiatan DAK Fisik	Rp. 275.308.000,00

Peningkatan Jalan di Kec. Batulicin	Rp. 16.500.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Simpang Empat	Rp. 11.000.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Karang Bintang	Rp. 7.700.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Mantewe	Rp. 5.400.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Kusan Hulu	Rp. 18.500.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Kusan Hilir	Rp. 19.400.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Sungai Loban	Rp. 17.500.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Angsana	Rp. 2.000.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Satui	Rp. 7.400.000.000,00
Peningkatan Jalan di Kec. Kuranji	Rp. 1.200.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rp. 3.500.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Rp. 2.200.000.000,00
Program Pengendalian Banjir	
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Rp. 3.200.000.000,00
Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai	Rp. 250.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp. 10.000.000.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Rp. 5.500.000.000,00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Rp. 600.000.000,00
DED Pengembangan Jaringan Irigasi	Rp. 1.500.000.000,00
Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project)	Rp. 800.000.000,00
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Rp. 900.000.000,00
DED, Model Test dan Sertifikasi Bendungan Kusan Kab. Tanah Bumbu (Multi Years 2017-2018-2019)	Rp. 8.100.000.000,00
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air	Rp. 3.100.000.000,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
Penataan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 4.722.500.000,00
Program Pemanfaatan Ruang	
Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemanfaatan ruang	Rp. 52.100.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang	
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Rp. 1.000.000.000,00
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Rp. 1.000.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Rp. 100.000.000,00
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi	
Sertifikasi Jasa Konstruksi	Rp. 200.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021 yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program dan kegiatan tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga renja ini dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2019.

Gunung Tinggi, Januari 2018

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Tanah Bumbu**

Roy Rizali Anwar, MT

NIP. 19810430 200312 1 006

LAMPIRAN TABEL